

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Kepala Sekolah dengan Partisipasi Anggaran sebagai Variabel Intervening (Studi pada SMAN di Kabupaten Wajo)

Andi Mulia Saleh

Dosen STIE Tri Dharma Nusantara Makassar
andimulya987@gmail.com

ABSTRACT

This research conducted with the aim to (1) to test and analysis the influence of financial management transparency and accountability towards the performance of school headmaster and the budget participation as the intervening variable at SMAN in Wajo regency. This research used the quantitative approach. The place of research conducted to 15 SMAN in Wajo regency by distributing questionnaire amount 180 copies to respondents as population. Sample selected by using the solution sampling considering the respondent has already worked for two years. The questionnaire used likers scale. The method of analysis used path analysis. Hypothesis test used significance level $\alpha = 0.05$. The obtained data then proceeded by using SPSS 15. The results of descriptive analysis showed that transparency, accountability, budget participation, and the performance of school principal existed in high category. The result of hypothesis test showed the direct positive and significant influence between transparency and accountability towards the performance between transparency and accountability towards the indirect positive influence between transparency and accountability towards the performance of school headmaster with the budget participation as the intervening variable.

Keywords : *Transparency, accountability, budget participation and the performance of school headmaster.*

PENDAHULUAN

Semangat reformasi membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk perubahan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang ditandai dengan yang sangat ini telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pelimpahan wewenang kepada daerah membawa konsekuensi terhadap seluruh pembiayaan untuk mendukung desentralisasi. Pengelolaan pendidikan yang diarahkan pada desentralisasi pendidikan, memberikan otonomi pendidikan

yang luas bagi sekolah untuk menentukan kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu perlu kesiapan sekolah sebagai ujung tombak memberikan pelayanan operasional pendidikan.

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang merupakan tempat proses pendidikan dilaksanakan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis dan saling berkaitan. Oleh karena itu, sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan disyaratkan menguasai keterampilan dan kompetensi tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai kepala sekolah. Dengan demikian kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan kepala sekolah dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkan menjadi berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan, dan peningkatan potensi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Sejalan dengan otonomi daerah, penyelenggaraan pendidikan

mengalami perubahan mendasar melalui pemberian otonomi pendidikan yang menuntut pengelolaan pendidikan secara otonom. Paradigma baru pengelolaan pendidikan yang dikenal dengan model *School Based Management* Berbasis Sekolah (MBS). Kebijakan manajemen berbasis sekolah memungkinkan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada kepala sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung kepada guru, karyawan, dan komite sekolah bersama-sama terlibat dalam mengelola pendidikan. Hal ini memungkinkan adanya kerja sama yang erat antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite sekolah dalam upaya meningkatkan produktivitas sumber daya dan peningkatan kualitas pendidikan.

Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektifitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan *monitoring* dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel, transparan

dan demokratis serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan (Mulyasa, 2002:26).

Lima aspek penting dalam MBS yaitu: (1) Keterbukaan manajemen sekolah, diartikan sebagai keterbukaan kepala sekolah pada guru, karyawan, dan komite sekolah pada program yang disusun bersama dan penggunaan dananya. (2) Kerja sama yang harmonis antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite sekolah. (3) Kemandirian sekolah, yaitu kemampuan sekolah untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, (4) Akuntabilitas program, yaitu melaksanakan program-program sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan, (5) Keberlanjutan program, program harus terus berlanjut bahkan berkembang meskipun bantuan dihentikan.

Pada sistem MBS, kepala sekolah dituntut secara mandiri dalam menggali, mengalokasikan, mengelola, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam MBS partisipasi guru, karyawan, dan komite sekolah sangat diperlukan dalam membuat

keputusan-keputusan yang penting termasuk menentukan perencanaan pengembangan sekolah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Lain dari pada itu dalam otonomi pendidikan pengambilan keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana guru, karyawan, dan komite sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan sekolah.

Untuk dapat mencapai hal tersebut kepala sekolah perlu terapkan konsep transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Jika manajemen sekolah semakin terbuka dan akuntabel, maka semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan meningkat pula perasaan memiliki terhadap sekolah. Tingkat partisipasi makin besar maka rasa memiliki semakin besar pula, makin besar tanggung jawabnya, makin besar pula dedikasinya, makin besar dedikasinya makin besar pula kontribusinya, makin besar kontribusinya makin tinggi pula kemajuan sekolah (Depdiknas : 2001).

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber dana pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penelitian ini ingin mengetahui pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Kepala Sekolah dengan menambah Partisipasi Anggaran sebagai variabel *intervening* pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Wajo.

Dengan demikian semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan program dan keuangan sekolah akan menambah motivasi guru, karyawan, dan komite sekolah untuk terlibat pada partisipasi anggaran untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik dengan tujuan meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pada pengembangan pendidikan.

Kepala sekolah diharapkan makin berdaya dalam mengurus dan mengatur sekolah yang dipimpin dengan tetap berpegang pada aturan-aturan kebijakan pendidikan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Disebutkan lebih lanjut, transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik (Meuthia, 2000). Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi menekankan keterbukaan dalam memberikan informasi sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keterbukaan sekolah akan

memperoleh masukan, usulan, pendapat dari seseorang atau kelompok terutama dalam penyusunan anggaran untuk mendukung program sekolah. Sementara itu, Siregar (2001), mengatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Transparansi mengandung prinsip, yaitu pertama mudah dipahami oleh masyarakat, kedua dapat diterima oleh masyarakat, ketiga dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah termasuk dinas-dinas dan pelaksana teknisnya selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Keterbukaan/transparansi dalam pengelolaan sekolah merupakan karakteristik sekolah yang menerapkan MBS. Keterbukaan/transparansi ini ditujukan dalam pengambilan keputusan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol (Depdiknas, 2001).

Akuntabilitas

Akuntabilitas berkenaan dengan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi dan pengungkapan atas segala aktivitas dan kinerja dari pihak wali amanah kepada pemberi amanah. Menurut Suryadhi (2007) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Lalolo Krina, 2003). Ada lima prinsip akuntabilitas publik di lingkungan instansi pemerintah yaitu (LAN dan BPKP, 2002):

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengolahan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi Anggaran

Partisipasi merupakan kata kunci dalam proses peningkatan mutu secara berkelanjutan di sekolah. Potensi yang dimiliki oleh para pelaku pendidikan di sekolah dan para pihak pelanggan sekolah (utamanya peserta didik, orang tua, pengguna lulusan sekolah, dan warga masyarakat lainnya), adalah kekayaan yang sangat berharga dan berarti apabila bisa didayagunakan sehingga aktif berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dalam lingkungan pendidikan lebih dikaitkan dengan keterlibatannya dalam hal memberikan kontribusi dana pada sekolah untuk mencukupi anggaran penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi ini disebut partisipasi pembiayaan orang tua siswa. Partisipasi pembiayaan (*local funding*) adalah jumlah pendapatan sekolah yang berasal dari orang tua siswa.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 54: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, (2) masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Pasal 56: (3) komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Sedangkan Bastian (2007:90) menyebutkan bahwa: dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan. Secara umum, pendanaan pendidikan di sekolah dapat berasal dari tiga sumber, yakni pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat menghasilkan informasi yang lebih baik, tetapi adakalanya justru menimbulkan problem baru. Keikutsertaan para manajer dalam penyusunan anggaran mengakibatkan mereka akan

menetapkan anggaran yang relatif mudah (longgar), sehingga akan menimbulkan *slack* yang mengecilkan prestasi yang diharapkan. *Slack* muncul secara tidak sengaja dalam proses perundingan dan merupakan hasil yang lazim dari proses yang bersifat partisipatif.

Kinerja Kepala Sekolah

Kinerja kepala sekolah adalah pencapaian atau prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses persekolahan (Slamet, 2003:2) dalam Susanto, B dan Wuradji (2005). Kinerja kepala sekolah dapat diukur dari hasil kerja secara kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Depdiknas, 2001:26).

Pengukuran kinerja pendidikan/ sekolah akan dapat mengetahui posisi yang telah dicapai dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Kinerja kepala sekolah berkaitan dengan mutu output sekolah, mutu output sekolah dapat berupa prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik

berupa nilai ulangan umum, hasil ujian sekolah maupun ujian nasional. Prestasi non akademik berupa prestasi olah raga, keterampilan, kejujuran, kesopanan, ketertiban, dan lain-lain. Dengan mengetahui kinerja kepala sekolah, maka efektifitas pendidikan dan pengajaran dapat digunakan: (a) sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, (b) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pengajaran (Depdiknas,2001).

Hipotesis

1. Hubungan transparansi terhadap partisipasi anggaran.
 H_1 : Transparansi pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi anggaran.
2. Hubungan akuntabilitas terhadap partisipasi anggaran.
 H_2 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi anggaran.
3. Hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja kepala Sekolah.

H₃ : Partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah.

4. Hubungan transparansi terhadap kinerja kepala sekolah.

H₄: Transparansi pengelolaan keuangan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah.

5. Hubungan akuntabilitas terhadap kinerja sekolah.

H₅ : Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Supaya dapat diperoleh data yang dibutuhkan memadai, maka dilakukan penelitian lapangan agar data yang diharapkan dapat sesuai dengan harapan peneliti yaitu akurat dari tanggapan responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pihak internal sekolah yaitu wakil kepala sekolah, guru, bendahara, karyawan dan komite sekolah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 15 SMA Negeri di Kabupaten Wajo dengan data sebagai berikut:

1. SMA Negeri 1 Sengkang
2. SMA Negeri 2 Sengkang
3. SMA Negeri 3 Sengkang
4. SMA Negeri 1 Pitumpanua
5. SMA Negeri 1 Majauleng
6. SMA Negeri 1 Manjang Pajo
7. SMA Negeri 1 Bealawa
8. SMA Negeri 1 Pammana
9. SMA Negeri 1 Sabbangparu
10. SMA Negeri 1 Takkalalla
11. SMA Negeri 1 Penrang
12. SMA Negeri 1 Keera
13. SMA Negeri 1 Bola
14. SMA Negeri 1 Sajoanging
15. SMA Negeri 2 Pitumpanua

Populasi pada penelitian ini adalah sekolah yaitu 15 SMA Negeri di Kabupaten Wajo dan sekaligus sebagai sampel. Responden pada penelitian ini adalah pihak internal sekolah yaitu wakil kepala sekolah, bendahara, pengurus komite, guru dan karyawan. Dengan jumlah responden sebanyak 180 responden dan rencana didistribusikan pada masing-masing

sekolah sejumlah 12 eksemplar pada setiap sekolah.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampling jenuh dengan menggunakan kriteria SMA Negeri di Kabupaten Wajo yang telah menghasilkan lulusan /tamatan minimal dua tahun dan respondennya adalah bekerja/ melaksanakan tugasnya minimal dua tahun. Pengambilan sampel dengan Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011).

Alasan pemilihan dengan metode Sampling jenuh adalah SMA Negeri di Kabupaten Wajo mempunyai karakteristik yang sama dalam hal manajemen/pengelolaan keuangan yaitu memiliki sumber pendanaan yang sama antara lain APBN, APBD, iuran komite sekolah, swadaya siswa.

Model Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi, dalam hal ini regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan bantuan Pengolahan data menggunakan SPSS. Adapun

model analisis yang digunakan adalah:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1\chi_1 + \beta_2 \chi_2 + e$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1\chi_1 + \beta_2 \chi_2 + Y_1 + e$$

Dimana:

Y_1 = Partisipasi Anggaran

Y_2 = Kinerja kepala Sekolah

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi (Parameter)

β_0 = Konstanta (*Intercept*)

e = Faktor Kesalahan (Error)

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Dari 180 eksemplar kuesioner yang di antar langsung dan diterima kembali sebanyak 174 eksemplar, sisanya sebanyak 6 eksemplar tidak kembali karena pada saat peneliti melakukan penelitian ada 6 responden tidak berada di sekolah, antara lain: pengurus komite 2 orang, wakil kepala sekolah 3 orang, dan bendahara 1 orang. Dari 174 eksemplar yang diterima kembali yang diolah menjadi data sebanyak 174 eksemplar karena semua responden memenuhi syarat sebagai sampel sebab bekerjanya sudah lebih dua tahun.

Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dalam mendeskripsikan variabel penelitian, nilai rata-rata pada masing-masing variabel dikelompokkan dalam lima kelas. Untuk mengetahui kecenderungan responden, maka dibuat klasifikasi berdasarkan norma yang disusun sesuai dengan tingkat diferensiasi yang dikehendaki yang ditetapkan batasannya berdasarkan rentang skor minimum-maksimum teoritiknya. Norma kategorisasi atau klasifikasi yang digunakan adalah (Azwar: 2006: 108) sebagai berikut:

$$X \leq mt - 1.5 sdt = \text{Sangat Rendah}$$

$$mt - 1.5 sdt < x < mt - 0.5 sdt \\ = \text{Rendah}$$

$$mt - 0.5 sdt < x < mt + 0.5 sdt \\ = \text{Sedang}$$

$$mt + 0.5 sdt < x < mt + 1.5 sdt \\ = \text{Tinggi}$$

$$mt + 1.5 sdt \leq X \\ = \text{Sangat Tinggi}$$

mt adalah mean rata-rata teoritik diperoleh dari skor maksimum teoritik dibagi dua. Sedangkan sdt

adalah standar deviasi teoritik yang diperoleh dari skor maksimum teoritik dikurangi skor minimum teoritik kemudian dibagi enam (Azwar, 2006: 109). Instrumen keempat variabel diukur dengan skala lima poin dengan rentang nilai 1-5, skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Jadi $mt = (5+1) / 2 = 3$ dan $sdt = (5-1) / 6 = 0.67$.

Berdasarkan mean teoritik dan standar deviasi teoritik, maka dapat ditentukan klasifikasi dengan lima kategori, sebagai berikut:

$$x \leq 3 - (1.5 \times 0.67) \\ = \text{Sangat Rendah}$$

$$3 - (1.5 \times 0.67) < x \leq 3 - (0.5 \times 0.67) \\ = \text{Rendah}$$

$$3 - (0.5 \times 0.67) < x \leq 3 + (0.5 \times 0.67) \\ = \text{Sedang}$$

$$3 + (0.5 \times 0.67) < x \leq 3 + (1.5 \times 0.67) \\ = \text{Tinggi}$$

$$3 + (1.5 \times 0.67) \\ = \text{Sangat Tinggi}$$

Atau

$$x \leq 2.00 = \text{Sangat Rendah}$$

$$2.00 < x \leq 2.67 = \text{Rendah}$$

$$2.67 < x \leq 3.33 = \text{Sedang}$$

$$3.33 < x \leq 4.00 = \text{Tinggi}$$

$$4.00 < x = \text{Sangat Tinggi}$$

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Rata-Rata	Standar Deviasi	Kategori
Transparansi (X_1)	21.91	2.681	Sangat Tinggi
Akuntabilitas (X_2)	26.63	3.013	Sangat Tinggi
Partisipasi Anggaran (X_3)	21.54	2.571	Sangat Tinggi
Kinerja Kepala Sekolah (X_4)	30.06	3.418	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1 tersebut, maka hasil statistik deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel Transparansi

Variabel transparansi memiliki nilai rata-rata sebesar 21.91, nilai ini berada dalam rentang $4.00 < X$ yang berarti sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kepala sekolah secara umum memiliki tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat tinggi.

2. Variabel Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas memiliki rata-rata 26.63, nilai ini berada dalam rentang $4.00 < X$ yang berarti sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kepala sekolah secara umum memiliki tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat tinggi.

3. Variabel Partisipasi Anggaran

Variabel partisipasi anggaran memiliki rata-rata sebesar 21.54, nilai ini berada dalam rentang $4.00 < X$ yang berarti sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kepala sekolah secara umum memiliki tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran sekolah sangat tinggi.

4. Variabel Kinerja Kepala Sekolah

Variabel kinerja kepala sekolah memiliki rata-rata nilai 30.66, nilai ini berada dalam rentang $4.00 < X$ yang berarti sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kepala sekolah secara umum kinerjanya sangat tinggi terhadap sekolah.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengestimasi besar dan signifikansi hubungan antar variabel dan melibatkan variabel antara atau disebut juga variabel *intervening*. Analisis jalur dapat dikelompokkan ke dalam metode multivariat karena melibatkan lebih dari satu variabel yang terikat dan

teknik analisis jalur dapat digunakan untuk mengestimasi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung serta pengaruh total diantara beberapa variabel.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dapat diketahui seberapa besar koefisien masing-masing variabel terhadap variabel lain atau disebut dengan koefisien jalur (*path coefficient*). Berdasarkan Tabel 2 hasil pengujian hipotesis, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis 1 dan 2

Model	Bukan Standar Koefisien		Standar Koefisien	t	Sig
	B	Std. Error			
Konstanta	1.391	0.996	-	1.397	0.164
X ₁	0.457	0.053	0.476	8.615	0.000
X ₂	0.381	0.047	0.447	8.007	0.000

Variabel Dependen : Y₁

Sumber: Data diolah, 2017

1. Uji Hipotesis 1

Pengujian Transparansi (X₁) terhadap Partisipasi Anggaran (Y₁)

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi anggaran dapat dilihat bahwa koefisien *path* pengaruh langsung transparansi

terhadap partisipasi anggaran sebesar 0.457 (positif) dan diperoleh t hitung sebesar 8.615 dengan nilai P (Sig) 0.000, karena mempunyai nilai $P = 0.000 < \alpha = 0.05$ maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan menunjukkan pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap partisipasi anggaran. Hasil pengujian hipotesis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bawuk Puji Santoso (2005) yang menemukan hasil penelitiannya bahwa pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan dengan Transparansi memiliki kontribusi yang signifikan pada penerimaan anggaran.

2. Uji Hipotesis 2

Pengujian Akuntabilitas (X_2) terhadap Partisipasi Anggaran (Y_1)

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan

keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi anggaran. Dapat dilihat bahwa koefisien *path* pengaruh langsung akuntabilitas terhadap partisipasi anggaran adalah sebesar 0.381 (positif) dan diperoleh t hitung sebesar 8.077 dengan nilai P (Sig) 0.000, karena mempunyai nilai $P = 0.000 < \alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi anggaran.

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis 3

Model	Bukan Standar Koefisien		Standar Koefisien Beta	t	Sig
	B	Std. Error			
Konstan	8.581	1.401	771	6.126	0.000
Y_1	1.025	0.065		15.876	

Variabel Dependen: Y_2

Sumber: Data diolah, 2017

3. Uji Hipotesis 3

Pengujian Partisipasi Anggaran (Y_1) terhadap Kinerja Kepala Sekolah (Y_2)

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah. Dapat dilihat

bahwa koefisien *path* pengaruh langsung partisipasi anggaran terhadap kinerja kepala sekolah adalah sebesar 1.025 (positif) dan diperoleh t hitung sebesar 15.876 dengan nilai P (Sig) 0.000, karena mempunyai nilai $P = 0.000 < \alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_3

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran menunjukkan pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah.

Tabel 4
Hasil pengujian Hipotesis 4 dan 5

Model	Bukan Standar Koefisien		Standar Koefisien Beta	t	Sig
	B	Std. Error			
I Konstan	4.879	1.452		3.359	0.001
X ₁	0.441	0.077	0.346	5.704	0.000
X ₂	0.605	0.69	0.534	8.796	0.000

Variabel Dependen : Y₂
Sumber: Data diolah, 2017

4. Uji Hipotesis 4

Pengujian Transparansi (X₁) terhadap kinerja kepala sekolah (Y₂)

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah. Dapat dilihat bahwa koefisien *path* pengaruh langsung transparansi terhadap kinerja kepala sekolah adalah sebesar 0.441 (positif) dan diperoleh t hitung sebesar 5.704 dengan nilai P (Sig) = 0.000, karena mempunyai nilai $P = 0.000 < \alpha = 0.05$, maka H₀ ditolak dan H₄ diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan sekolah mempunyai pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Susanto dan Wuradji (2005) Transparansi mempunyai hubungan positif dengan kinerja kepala sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening.

5. Uji Hipotesis 5

Pengujian Akuntabilitas (X₂) terhadap Kinerja Kepala Sekolah (Y₂)

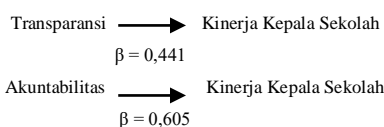
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah. Dapat dilihat bahwa koefisien *path* pengaruh langsung akuntabilitas terhadap kinerja kepala sekolah

adalah sebesar 0.605 (positif) dan diperoleh nilai t hitung sebesar 8.796 dengan nilai P (Sig) 0.000, karena mempunyai nilai $P = 0.000 < \alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_5 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Susanto dan Wuradji (2005) bahwa akuntabilitas mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja kepala sekolah baik langsung maupun tidak langsung melalui variabel perantaranya.

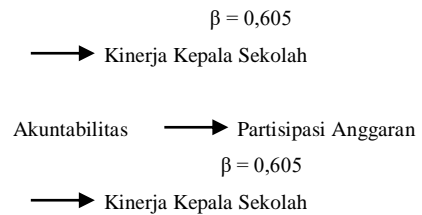
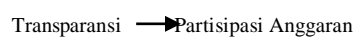
6. Analisis Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Dari Hasil Uji Intervening

Pengaruh langsung dan tidak langsung dari Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Kepala Sekolah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pengaruh Langsung



b. Pengaruh Tidak Langsung



Berdasarkan penjelasan di atas, besarnya β diperoleh dari hasil analisis jalur path. Hasil β tersebut sesuai dengan hasil korelasi antara Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Kepala Sekolah yang secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa variabel Partisipasi Anggaran sebagai variabel Intervening teruji dapat mempengaruhi secara signifikan antara Transparansi, Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Kinerja Kepala Sekolah.

1) Transparansi pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah melalui partisipasi anggaran adalah sebesar $(0.457 \times 1.025) = 0.468$ (positif) berdasarkan nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa transparansi melalui partisipasi anggaran berpengaruh secara tidak

langsung terhadap kinerja kepala sekolah.

- 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah melalui partisipasi anggaran sebagai variabel *intervening*. Akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui variabel partisipasi anggaran berpengaruh tidak langsung sebesar $(0.381 \times 1.025) = 0.391$ terhadap kinerja kepala sekolah. Pada hasil ini analisis hubungan antara variabel akuntabilitas dan partisipasi anggaran menunjukkan hasil yang signifikan.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Partisipasi Anggaran

Dari hasil perhitungan SPSS menunjukkan bahwa Koefisien *path* variabel transparansi berpengaruh terhadap partisipasi anggaran adalah sebesar 0.457 (positif) dengan signifikan = 0.000 $P = 0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti transparansi

pengelolaan keuangan menunjukkan pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap partisipasi anggaran ini dapat dipahami bahwa terjadinya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan pada SMAN di Kabupaten Wajo diikuti dengan meningkatnya partisipasi anggaran secara signifikan dan apabila terjadi penurunan tingkat transparansi, maka diikuti dengan menurunnya partisipasi anggaran. Bukti empiris yang dapat dijelaskan dalam hal ini bahwa pada saat ini SMA Negeri di Kabupaten Wajo telah banyak yang melaksanakan pola manajemen keuangan internal sekolah mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja kepala sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keterbukaan kepala sekolah dalam memberikan informasi sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah para stakeholders untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Disamping itu juga faktor keterbukaan kepala sekolah

memperoleh masukan, usulan, pendapat dari stakeholders dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan partisipasi stakeholders untuk mendukung program sekolah.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawuk Puji Santoso (2005) memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa pengelolaan keuangan yang diselenggarakan dengan secara transparansi akan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan sekolah, juga masyarakat memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembiayaan pendidikan.

2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Partisipasi Anggaran

Dari hasil perhitungan SPSS menunjukkan bahwa Koefisien *path* variabel Akuntabilitas mempunyai pengaruh langsung terhadap partisipasi anggaran adalah sebesar 0.381 (positif) dengan signifikan $P = 0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi anggaran. Ini dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SMAN di Kabupaten Wajo semakin tinggi pula partisipasi pihak internal sekolah dalam penyusunan anggaran sekolah. Dan apabila terjadi penurunan tingkat akuntabilitas, maka tingkat partisipasi *stakeholders* dalam penyusunan anggaran akan menurun.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka kualitas penyusunan anggaran semakin baik agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari para stakeholders.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bambang Susanto dan Wuradji (2005) menunjukkan bahwa

akuntabilitas mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel perantara yaitu partisipasi anggaran.

3. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Kepala Sekolah

Dari hasil perhitungan SPSS menunjukkan bahwa Koefisien *Path* mempunyai pengaruh langsung partisipasi anggaran terhadap kinerja kepala sekolah adalah sebesar 1.025 (positif) dengan signifikan $P = 0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti partisipasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah. Ini dapat dipahami apabila terjadi peningkatan partisipasi penyusunan anggaran pada SMAN di Kabupaten Wajo akan diikuti dengan meningkatnya kinerja kepala sekolah dan demikian pula sebaliknya apabila terjadi penurunan tingkat partisipasi penyusunan anggaran akan diikuti menurunnya kinerja kepala sekolah secara signifikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa,

keterlibatan stakeholders dalam pengusulan dan penyusunan anggaran sangat berharga dan berarti dalam keterlibatannya memberikan kontribusi dana pada sekolah untuk mencukupi anggaran penyelenggaraan pendidikan.

Perlu juga diketahui bahwa dengan tingkat kepercayaan para stakeholders untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah, salah satu peran partisipasi dari warga sekolah adalah dengan bersama-sama merumuskan dan menyetujui program-program sekolah dalam hal ini adalah pembiayaan, ketenagaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran. Pengaruh yang dimiliki oleh stakeholders dalam pengambilan keputusan adalah ikut berpartisipasi aktif karena kepala sekolah meminta pendapat pada pihak-pihak yang berkepentingan setiap pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bambang Susanto dan Wuradji (2005). Hasil dari pengujian

hipotesis adalah kualitas pimpinan kepala sekolah, supervise, dan partisipasi komite sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sekolah.

4. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Kepala Sekolah

Dari hasil perhitungan SPSS menunjukkan bahwa Koefisien *path* variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja kepala sekolah adalah sebesar 0.441 (positif) dengan signifikan (P) 0.000 $P = 0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti transparansi pengelolaan keuangan menunjukkan pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah. Dan dapat dipahami bahwa terjadinya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan pada SMAN di Kabupaten Wajo akan diikuti dengan peningkatan kinerja kepala sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas keterbukaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya akan dapat mengetahui posisi yang telah dicapai. Dengan keterbukaan kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, maka hubungan sekolah dengan pihak luar semakin baik. Disamping itu juga faktor kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan bekerja sama dengan lembaga lain untuk menjalin kemitraan yang berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bawuk Puji Santoso (2005) memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah dilakukan dengan transparansi, juga masyarakat memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembiayaan pendidikan, besarnya kontribusi penerimaan pendapatan

sekolah yang bersumber dari orang tua siswa (komite sekolah).

5. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Kepala Sekolah

Dari hasil perhitungan SPSS menunjukkan bahwa Koefisien *path* variabel akuntabilitas berpengaruh langsung terhadap kinerja kepala sekolah adalah sebesar 0.605 (positif) dengan signifikan $P = 0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah. Dan dapat dipahami bahwa apabila terjadi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SMAN di Kabupaten Wajo akan diikuti dengan peningkatan kinerja kepala sekolah secara signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bawuk Puji Santoso (2005) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan diantaranya bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara

akuntabel, sehingga mendukung terciptanya *horizontal accountability*.

6. Transparansi Pengelolaan Keuangan Berpengaruh Tidak Langsung terhadap Kinerja Kepala Sekolah yang Dimediasi oleh Variabel *Intervening*

Berdasarkan hasil uji analisis jalur, pengaruh langsung sebesar 0.441 (positif) dan pengaruh tidak langsung sebesar 0.468 (positif). Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel transparansi dengan variabel kinerja kepala sekolah yang dimediasi oleh variabel *intervening* partisipasi anggaran menunjukkan pengaruh tidak langsung secara signifikan, karena setelah dikontrol dengan variabel bebas dan variabel terikat serta variabel *intervening* terjadi kenaikan.

7. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berpengaruh Tidak Langsung terhadap Kinerja Kepala Sekolah yang Dimediasi oleh Variabel Partisipasi Anggaran

Berdasarkan hasil uji analisis jalur pengaruh langsung sebesar 0.605 (positif) dan pengaruh tidak langsung sebesar 0.391 (positif). Dapat disimpulkan

bahwa hubungan antara variabel akuntabilitas dengan kinerja kepala sekolah yang dimediasi oleh variabel *intervening* menunjukkan pengaruh tidak langsung yang signifikan. Setelah dikontrol dengan variabel *intervening* hubungan variabel bebas dengan variabel terikat terjadi penurunan, namun masih signifikan, maka disini terjadi mediasi *parsial*.

8. Total Pengaruh antara Transparansi dengan Kinerja Kepala Sekolah

Transparansi dengan partisipasi anggaran serta partisipasi anggaran dengan kinerja kepala sekolah adalah sebesar $0.441 + (0.457 \times 1.025) = 0.909$. Transparansi pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah melalui partisipasi anggaran sebagai variabel *intervening*.

9. Total Pengaruh antara Akuntabilitas, Partisipasi, Anggaran dengan Kinerja Kepala Sekolah

Sebesar $0.605 + (0.381 \times 1.025) = 0.996$. Akuntabilitas pengelolaan keuangan

menyatakan bahwa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah melalui partisipasi anggaran sebagai variabel *intervening*.

KESIMPULAN

Dalam analisis deskriptif untuk menunjukkan rata-rata masing-masing variabel, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil pengujian dan analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi responden terhadap transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggaran, dan kinerja kepala sekolah atas dasar *mean* (rata-rata) menunjukkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan sangat tinggi, tingkat partisipasi wakil kepala sekolah, guru, bendahara, karyawan, dan komite sekolah dalam penyusunan anggaran sangat tinggi serta kinerja kepala sekolah menunjukkan pula sangat tinggi.

2. Transparansi pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah, analisis jalur menunjukkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung melalui variabel *intervening* partisipasi anggaran.
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah, analisis jalur menunjukkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung melalui variabel *intervening* partisipasi anggaran.
4. Partisipasi stakeholders dalam penyusunan anggaran pada SMA Negeri di Kabupaten Wajo akan mempengaruhi meningkatnya kinerja kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2006). *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Susanto dan Wuradji (2005). *“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi, dan Partisipasi Komite Sekolah terhadap Kinerja Sekolah”*
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- _____ (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 1*, Salemba Empat.
- Bawuk Puji Santoso (2005). *“Akuntansi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan, Partisipasi Pembiayaan, dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan: Studi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Banyumas”* (Tesis).
- Krina P.L.L, (2003). *“Indikator dan Alat ukur prinsip Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi”*, <http://www.goodgovernance.bappenas.go.id> yang dikunjungi tanggal 11 November 2011
- LAN dan BPKP, (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN, Jakarta.
- Mulyasa, (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang *Standar Pengelolaan*.
- Sarwono, Jonathan. (2007). *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Siregar, Baldric dan Bonni Siregar, (2001). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*, Edisi Ketiga,

Bagian Penerbitan STIE,
Yogyakarta : YKPN.

Sugiyono, (2011). *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta

Susanto, B. Dan Wuradji, (2005). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi dan Partisipasi Komite Sekolah terhadap Kinerja Sekolah*. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Nomor 1 Tahun VII.

Suryadhi J.P, (2007). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Menunjang Pelaksanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. www.google.com (key: pelaksanaan DIPA).

